



# Sengketa Lahan Jadi kendala Normalisasi Sungai

## ► Sumur Resapan Tak Lagi Dapat Anggaran

### Gambir, Warta Kota

Program normalisasi sungai oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih menjadi sorotan berbagai pihak karena dianggap mangkrak (tidak efektif).

Normalisasi sungai merupakan salah satu program pengendalian banjir, selain sumur resapan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa adanya sengketa lahan yang membuat program tersebut tidak berjalan.

"Selama ini kan masalahnya terkait kasus-kasus tanah, di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza, pada Kamis (6/10/2022).

Ia mengklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengerahkan beragam upaya untuk mengatasi masalah banjir.

Salah satu hal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat sertifikasi tanah di DKI Jakarta.

Lebih lanjut Ariza mengaku bahwa dalam satu hingga dua tahun terakhir ada percepatan dan akan dilakukan lebih baik lagi, terkait persertifikatan tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

**Selama ini kan masalahnya terkait kasus-kasus tanah, di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah.**

**Ahmad Riza Patria**  
Wakil Gubernur  
(Wagub) DKI Jakarta

"Kami kan sudah melakukan program lain juga, seperti sumur resapan maupun pembangunan sembilan polder, empat waduk, dan revitalisasi dua sungai yang dikenal dengan project 942," kata Ariza,

### Sumur Resapan

Sementara itu sumur resapan merupakan salah satu program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir di ibu kota.

Namun, pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta sudah tidak lagi mengeluarkan

anggaran untuk penyediaan sumur resapan tersebut.

Hal tersebut karena sumur resapan dianggap tidak terlalu signifikan fungsinya untuk menanggulangi banjir yang memang menjadi masalah serius di DKI Jakarta.

Ariza tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya artinya gini, Pemprov DKI Jakarta kan pernah menganggarkan dan melaksanakan. Kemudian juga kemarin tidak disetujui oleh DPRD," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov merasa perlu bahwa sumur resapan dirasakan manfaatnya cukup memberikan pengaruh yang positif pada penanganan banjir.

Namun demikian, ia juga membenarkan bahwa DPRD DKI Jakarta belum menyetujui adanya program sumur resapan tersebut.

"Ya memang itu nanti kan masih pembahasan. Pembahasan nanti pada Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta selanjutnya," ucap Ariza.

Ariza menegaskan lanjut atau tidak program sumur resapan tersebut, hal itu menjadi kewenangan Pj gubernur berikutnya.

"Kami tidak ingin mengintervensi Pj gubernur, karena beliau nantinya pasti punya keleluasaan dan kewenangan yang terbaik," kata Ariza.

(m36)